

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Oktivrina dan Nelyumna (2016) dengan judul penelitian Pengaruh *good corporate governance* dan auditor eksternal terhadap *audit delay* (studi empiris pada perusahaan industri perbankan di bursa efek indonesia 2011-2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit secara statistik berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal itu dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel komite audit yang berada di bawah 0,05 yaitu nilai (sig) sebesar 0,01. Dewan komisaris secara statistik berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal itu dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel dewan komisaris yang berada di bawah 0,05 yaitu nilai (sig) sebesar 0,014. auditor eksternal berpengaruh terhadap *audit delay*. Auditor eksternal mempengaruhi *Audit Delay* karena perusahaan yang menggunakan jasa auditor independen Kantor Akuntan Publik *The Big Four* dapat menyelesaikan laporan keuangan lebih cepat dibandingkan perusahaan yang menggunakan jasa auditor independen di luar Kantor Akuntan Publik *The Big Four*. KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, dapat mengaudit tepat waktu dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga reputasinya. Dan kinerja auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik *The Big Four* lebih cepat dari Kantor Akuntan Publik *Non Big Four*, sehingga lebih cepat dalam penyelesaian pekerjaannya.

Saemargani dan Mustikawati (2015) dengan judul penelitian Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran kap, dan opini auditor terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini menunjukkan Ukuran Perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay*. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,228 > 0,05$) dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($1,228 < 2,030$). Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*. Hal tersebut dibuktikan

dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($0,038 < 0,05$) dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,156 > 2,030$). Solvabilitas Perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Audit Delay* tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,921 > 0,05$) dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($0,100 < 2,030$). Ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay*. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,243 > 0,05$) dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($1,188 < 2,030$). Opini Auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay*. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,117 > 0,05$) dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($1,609 < 2,030$). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan, Solvabilitas Perusahaan, Ukuran KAP, dan Opini Auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($0,008 < 0,05$) dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($3,506 > 2,37$).

Arofah, Astuti, Harimurti (2017) dengan judul penelitian Ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pengaruh kepemilikan publik komite audit dan laba rugi terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan publik berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil uji t menunjukkan nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel kepemilikan publik sebesar $0,956 > 0,05$ dan nilai t hitung $-0,055$. Komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi (Sig t) variabel komite audit sebesar $0,558 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-0,589$, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* ditolak. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa laba rugi tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,157 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-1,429$ yang menunjukkan bahwa laba rugi tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa laba rugi berpengaruh terhadap *audit delay* ditolak. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan publik

terhadap audit *delay*. Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang telah dilakukan menyatakan bahwa ukuran perusahaan bukan merupakan variabel moderasi dari pengaruh kepemilikan publik terhadap audit *delay*. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian variabel yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,816 > 0,05$, hasil tersebut berarti bahwa hasil pengujian tersebut tidak signifikan, sehingga hipotesis keempat ditolak.

Angruningrum, Wirakusuma (2013) dengan judul penelitian profitabilitas, leverage, kompleksitas operasi, reputasi KAP dan komite audit pada *audit delay*. Hasil penelitian ini menunjukkan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. Berdasarkan Tabel 6 diperoleh nilai t hitung profitabilitas yaitu $-1,881 > -t$ tabel ($-1,980$) dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,062 > 0,05$. Jadi, hipotesis yang diajukan ditolak atau audit delay tidak dipengaruhi profitabilitas. *Leverage* berpengaruh positif terhadap audit delay Berdasarkan Tabel 6 diperoleh nilai t hitung leverage yaitu $2,411 > t$ tabel ($1,980$) dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,017$. Jadi, hipotesis yang diajukan didukung oleh hasil penelitian ini. Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Berdasarkan Tabel 6 diperoleh nilai thitung komplek yaitu $-0,682 < t$ tabel ($1,980$) dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,495 < 0,05$. Sehingga, H3 ditolak atau hipotesis yang diajukan tidak diterima. Reputasi KAP berpengaruh negatif pada *audit delay*. Berdasarkan Tabel 6 diperoleh nilai thitung KAP yaitu $-1,035 < ttabel$ ($-1,980$) dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,302$. Sehingga, H4 ditolak atau reputasi KAP tidak berpengaruh pada audit delay. Jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berdasarkan Tabel6 diperoleh nilai t hitung komau yaitu $-,1527 < ttabel$ ($1,980$) dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,128$. sehingga H5 ditolak. Jadi, lamanya keterlambatan audit tidak dipengaruhi komite audit.

Juanita, Satwiko (2012) dengan judul penelitian pengaruh ukuran kantor akuntan publik, kepemilikan, laba rugi, profitabilitas dan solvabilitas terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran menunjukkan Sig aktiva sebesar 0.493 lebih besar dari 0.05 , artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Ukuran KAP ditampilkan sebagai auditor

menunjukkan Sig sebesar 0.432 lebih besar dari 0.05, artinya ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Struktur kepemilikan ditunjukkan sebagai owner menunjukkan Sig sebesar 0.095 lebih besar dari 0.05, artinya struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Pelaporan laba rugi ditampilkan sebagai income menunjukkan Sig 0.034 lebih besar dari 0.05, artinya pelaporan laba rugi berpengaruh terhadap audit report lag. Profitabilitas ditampilkan sebagai ROA menunjukkan Sig 0.0943 lebih besar dari 0.05, artinya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Debt to equity ratio menunjukkan Sig 0.679 lebih besar dari 0.05, artinya Debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap audit report lag.

Azubike and Angreh (2014) premises research title corporate governance and audit delay in nigerian quoted Companies. The objective of this study is to examine the determinants of audit report timeliness in Nigeria. Specifically, the study examines the effect of company size, profitability complexity and audit firm type on audit report timeliness. The cross-sectional research design was adopted with an extensive reliance on secondary data. The data was source from annual reports of manufacturing companies quoted on the floor of the Nigerian stock exchange for 2010-2012. The ordinary least squares (OLS) regression technique was utilized as the method of data analysis. The finding of the study shows the following; (i) A significant relationship exist between board size and Audit report lag (ii) A significant relationship exists between board independence and Audit report lag (iii) A non-significant relationship exists between audit firm type and Audit report lag. It was also discovered that the time lag prescribed by the regulatory bodies are usually too much thus encouraging companies to engage in the act of delaying their financial statements. The recommendation is that in achieving the objective of making the financial statements readily available for making timely decisions, the Nigerian stock exchange, securities and exchange commission, the Financial Reporting council, the Central Bank of Nigeria and other regulatory bodies should put in place measures to ensure strict compliance with the laid down rules and regulations.

Azubike akhir Angreh (2014) dengan judul penelitian corporate governance dan audit delay di perusahaan yang dikutip oleh nigerian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor penentu ketepatan waktu laporan audit di Nigeria. Secara khusus, penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas profitabilitas dan jenis perusahaan audit terhadap ketepatan waktu laporan audit. Desain penelitian cross-sectional diadopsi dengan ketergantungan yang luas pada data sekunder. Data tersebut bersumber dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang dikutip di lantai bursa Nigeria untuk tahun 2010-2012. Teknik regresi least square square (OLS) digunakan sebagai metode analisis data. Temuan penelitian menunjukkan hal berikut; (i) signifikan (ii) Ada hubungan yang signifikan antara independensi dewan dan lag laporan audit (iii) Hubungan tidak signifikan antara jenis perusahaan audit dan lag laporan audit. Juga ditemukan bahwa menunda laporan keuangan mereka. Dewan pelapor, Bank Sentral Nigeria dan badan pengatur lainnya harus menerapkan langkah-langkah untuk menjamin kepatuhan yang ketat terhadap peraturan dan peraturan yang ditetapkan.

Turel and Tuncay (2013) premises research title an empirical analysis of audit delay in turkey. The main purpose of this study is to examine the factors that affect delays in the signing of audit reports in Turkey. The audit delay is measured as a function of the number of days that elapse from the accounting period until the date when the audit report is signed. This study utilizes a sample of 508 firms listed on the Borsa Istanbul in 2013. The findings indicate that the companies that report net income, that have standard audit opinion release their audited financial statements earlier. Variables such as auditor firm and leverage show no significant relationship with audit delay.

Turel dan Tuncay (2013) dengan judul penelitian analisis empiris penundaan audit pada kalkun. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penandatanganan laporan audit diukur sebagai fungsi dari jumlah hari yang berlalu dari periode akuntansi sampai tanggal laporan audit ditandatangani. Penelitian ini menggunakan sampel 508 perusahaan yang terdaftar di Bursa Istanbul pada tahun

2013. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan audit di Turki. Keterlambatan yang melaporkan laba bersih, yang memiliki pendapat audit standar merilis laporan keuangan mereka yang telah diaudit sebelumnya. Variabel seperti perusahaan auditor dan leverage tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan penundaan audit.

Elijah (2015) premises research title Corporate Attributes and Audit Delay in Emerging Markets: Empirical Evidence from Nigeria. The broad objective of the study was to examine the determinants of audit report lag in the Nigerian context. Specifically, the study examined the effects of the following factors on Audit fees; Audit firm type, Leverage, Return on equity, Firm size, subsidiaries and Year-end. The panel research design was used for the study. The data was sourced from the annual reports of all financial companies quoted on the floor of the Nigerian stock exchange. The method of data analysis utilized in the study is the panel data estimation techniques (pooled, fixed and random effects regression). In line with the study objectives, the finding reveals that (i) Company size has no significant positive impact on audit delay. (ii) Firm's financial performance has a significant impact on Audit delay. (iii) Audit firm type (big 4 and non-big 4) has a significant impact on Audit delay. (iv) Leverage has no significant impact on Audit delay and (v) Number of subsidiaries has a significant impact on Audit delay and (vi) Financial year end has no significant impact on Audit delay. The recommendation is that in achieving the objective of making the financial statements readily available for making timely decisions, the Nigerian stock exchange, Securities and Exchange Commission, the Financial Reporting Council, the Central Bank of Nigeria and other regulatory bodies should put in place measures to ensure strict compliance with 3 months window for financial reports preparation and presentation.

Elijah (2015) dengan judul penelitian Atribut Perusahaan dan Keterlambatan Audit di Pasar Berkembang: Bukti Empiris dari Nigeria. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor penentu lag laporan audit dalam konteks Nigeria. Secara khusus, penelitian ini meneliti dampak dari faktor-faktor berikut mengenai biaya Audit; Jenis perusahaan audit, Leverage,

Return on equity, ukuran perusahaan, anak perusahaan dan akhir tahun. Desain penelitian panel digunakan untuk penelitian ini. Data tersebut bersumber dari laporan tahunan semua perusahaan keuangan yang dikutip di lantai bursa saham Nigeria. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik estimasi data panel (pooled, fixed dan random effects regression). Sejalan dengan tujuan penelitian, temuan tersebut menunjukkan bahwa (i) ukuran perusahaan tidak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penundaan audit. (ii) Kinerja keuangan perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap penundaan audit. (iii) Jenis perusahaan audit (besar 4 dan non-besar 4) berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. (iv) Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit dan (v) Jumlah anak perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap keterlambatan audit dan (vi) akhir tahun buku tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit. Rekomendasinya adalah bahwa dalam mencapai tujuan membuat laporan keuangan tersedia untuk membuat keputusan yang tepat waktu, bursa efek Nigeria, Securities and Exchange Commission, Financial Reporting Council, Bank Sentral Nigeria dan badan pengatur lainnya harus menerapkan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan yang ketat dengan jendela 3 bulan untuk persiapan dan presentasi laporan keuangan.

2.2. Landasan Teori

Dalam landasan teori ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung hipotesis serta sangat berguna dalam analisis hasil penelitian. Landasan teori ini berisi penjabaran teori dan argumentasi yang disusun sebagai tentuan dalam memecahkan masalah penelitian serta perumusan hipotesis.

2.2.1 Laporan Keuangan

A. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 1 Paragraf 7 (Revisi 2013) efektif berlaku per 1 januari 2015 “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI,2012:6) disebutkan bahwa

laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen: (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode, (b) laporan laba rugi komprehensif, (c) laporan perubahan ekuitas selama periode, (d) laporan arus kas selama periode, (e) catatan atas laporan keuangan dan (f) laporan posisi keuangan pada awal periode.

a. Laporan Posisi Keuangan

Di akhir periode laporan keuangan diharuskan adanya laporan posisi keuangan untuk memberikan gambaran tentang performa perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tepat waktu dan bagaimana kemampuannya dalam menghasilkan modal akan ditampilkan di laporan posisi keuangan. Pendistribusian kas serta bentuk dividen yang diberikan kepada pemegang saham juga disajikan. Terdapat tiga elemen yang ada di dalam laporan keuangan, seperti, aset, liabilitas dan Ekuitas.

1. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang diasumsikan dapat memberikan keuntungan ekonomi di masa depan (contohnya kas, persediaan, gedung dll)
2. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan menggunakan asetnya (contohnya utang, pelayanan, dll) dan,
3. Ekuitas adalah modal yang dimiliki perusahaan setelah aset dikurangi kewajiban.

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan menurut PSAK yang memperlihatkan keuntungan dan kerugian yang dirasakan perusahaan dalam periode tertentu. Guna laporan ini adalah untuk memprediksi profit yang bisa dihasilkan perusahaan untuk masa mendatang. Elemen penghasilan komprehensif lain dapat di gabungkan atau di pisah dengan laporan laba rugi.

Terdapat dua komponen dalam laporan laba rugi yaitu, Pemasukan dan Pengeluaran. Pemasukan merupakan jumlah dari apa yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Misalnya penjualan, penerimaan dividen dan lainnya. Pengeluaran merupakan jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kurun periode tertentu misalnya, gaji sewa gedung dan depresiasi

c. Laporan Perubahan Ekuitas Selama Periode

Di dalam laporan perubahan ekuitas memberikan gambaran mengenai besarnya saldo modal perusahaan yang dipengaruhi laba dan rugi pada suatu periode tertentu. Lebih jelasnya, laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan yang timbul dari jumlah total laba rugi dan pendapatan komprehensif. Disamping itu, perusahaan juga perlu menyajikan jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik saham serta nilainya per saham.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan perputaran kas yang dibagi kedalam tiga kategori yaitu arus kas investasi, arus kas pendanaan dan arus kas operasi. Secara lebih jelas, laporan arus kas memberikan dasar pengguna laporan keuangan untuk menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Lalu bagaimana perusahaan mengelola kas untuk keperluan operasional.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

CALK atau Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dari laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal dan arus kas perusahaan serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Pada dasarnya komponen ini menyatakan informasi dari dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar pengukuran yang dipakai dan kebijakan akuntansi yang diterapkan juga informasi lain perlu disajikan untuk memahami laporan keuangan lebih baik lagi.

f. Laporan Posisi Keuangan Pada Awal Periode

Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. Jadi setiap perusahaan go publik diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang saat ini berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut SAK per efektif 1 januari 2015, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan nonkeuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat

demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomik; keputusan ini mungkin mencakup, sebagai contoh, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Menurut A Statment Of Basic Accounting Theory (ASOBAT) tujuan laporan keuangan dirumuskan sebagai berikut :

1. Membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan.
2. Mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya.
3. Memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan.
4. Membantu fungsi dan pengawasan sosial.

Dalam buku Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS, Kartika Hadi, et al (2012:118) mengungkapkan tujuan laporan keuangan, yaitu :

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercaya kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya pemilik mayoritas. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

C. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK: 2012:5-7) :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Guna mencapai maksud ini, diasumsikan pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Informasi tersebut relevan ketika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Agar relevan, informasi harus dapat digunakan untuk mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang (*predictive value*), menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya (*feedback value*), juga harus tersedia tepat waktu bagi pengambilan keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau untuk mempengaruhi keputusan yang diambil.

3. Keandalan

Informasi tersebut andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang dapat disajikan secara wajar.

4. Dapat dibandingkan

Identifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan laporan keuangan Perusahaan antar periode hendaknya dapat diperbandingkan oleh pemakai. Dengan demikian pemakai dapat memperoleh informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian karakteristik ini.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik tersebut dalam informasi keuangan yang disajikannya. Karakteristik relevan berarti laporan tersebut mampu mendeskripsikan kondisi keuangan perusahaan secara tepat waktu.

2.2.2 Audit

Berikut ini adalah definisi audit menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:2) audit adalah sebagai berikut:

”Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *auditing* merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas informasi tersebut yang dapat meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan. Dalam melaksanakan audit, auditor harus kompeten dalam mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu dan memiliki sikap mental independen.

Pengertian audit menurut Messier, Clover dan Prawitt (2014:12) adalah sebagai berikut: “Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”

Sedangkan definisi audit yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2012:4) adalah sebagai berikut:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”

2.2.3 Jenis – Jenis Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2015:16) Jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. **Audit Operasional (Operational Audit)** Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.
2. **Audit Ketaatan (Compliance audit)** Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.
3. **Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)** Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya

yang cocok untuk organisasi tersebut. dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

Dari ketiga jenis audit yang disebutkan di atas pada dasarnya memiliki kegiatan inti yang sama, yaitu untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan. Audit operasional (*operational audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara operasional usaha pada bagian tertentu di perusahaan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang telah ditetapkan manajemen. Audit ketaatan (*compliance audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara suatu pelaksanaan dan kegiatan pada perusahaan dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan pemerintah, ketetapan manajemen atau peraturan lainnya. Sedangkan audit laporan keuangan (*financial statement audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan keuangan dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Menurut Sukrisno (2012:10) jenis audit berdasarkan luasnya pemeriksaan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Umum (General Audit) Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Pengendalian mutu.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*) Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan audit) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada

pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilaksanakan juga terbatas.

Sedangkan ditinjau dari jenis pemeriksaan, menurut Sukrisno (2012:11) audit dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Management Audit (*Operational Audit*) Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*) Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia).
3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit) Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor biasanya lebih terinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tetapi memuat tentang temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal. Beserta saran-saran perbaikan (*recommendation*). Internal auditor merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen.
4. Computer Audit Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) System.

2.2.4 Tujuan Audit

Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan diatas, dapat kita ketahui bahwa tujuan auditing pada umumnya untuk menentukan apakah laporan

keuangan yang dihasilkan oleh pihak manajemen telah sesuai dengan kriteriakriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Institusi Akuntan Publik Indonesia (2011:110:1) tujuan auditing adalah “Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat”.

Untuk mengetahui tujuan audit, auditor harus mengevaluasi masing-masing asersi laporan yang berkaitan dengan saldo akun tertentu atau kelompok transaksi tertentu. Karena hubungan tujuan audit dengan asersi tersebut sangat erat, maka auditor seringkali menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Pengklasifikasian asersi tersebut menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:326.2) yaitu:

1. Keberadaan atau Keterjadian (*Existence or Accurrence*) Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu.
2. Kelengkapan (*Completeness*) Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan didalamnya.
3. Hak dan Kewajiban (*Right and Obligation*) Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.
4. Penilaian atau Alokasi (*Valuation or Allocation*) Asersi tentang apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang semestinya.
5. Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation and Disclosure*) Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan semestinya.

2.2.5 Standar Audit

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (SA Seksi 150) adalah sebagai berikut :

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak

dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggungjawab yang dipikul auditor.

2.2.6 Audit Delay

Menurut Dyer dan McHugh (dalam Silvia dan Made Gede : 2013) *Audit delay* adalah interval waktu antara tahun tutup buku laporan keuangan hingga opini pada laporan keuangan audit ditandatangani. Panjangnya masa *audit delay* ini berbanding lurus dengan lamanya masa pekerjaan lapangan diselesaikan auditor sehingga semakin lama pekerjaan lapangan diselesaikan auditor sehingga semakin lama pekerjaan lapangan maka semakin lama *audit delay* yang terjadi. Apabila laporan keuangan disajikan delay maka informasi yang terkandung didalamnya menjadi tidak relevan dalam pengambilan keputusan.

Audit delay mengimplikasikan bahwa laporan keuangan disajikan pada suatu interval waktu, maksudnya untuk menjelaskan perubahan di dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pengguna pada waktu membuat prediksi dan keputusan. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu akan menyebabkan informasi kehilangan nilainya di dalam mempengaruhi kualitas keputusan (Heru Setiawan : 2013)

Menurut Dyer dan McHugh dalam (Ricko Daniswara : 2015) terdapat tiga kriteria keterlambatan pelaporan keuangan antara lain :

1. *Preliminary Lag* adalah interval jumlah hari antara tanggal pelaporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa.
2. *Auditor's Report Lag / Audit Delay* adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
3. Total Lag adalah jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Manfaat dari

laporan keuangan suatu perusahaan tergantung pada keakuratan dan ketepatan waktunya. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan apabila laporan keuangan tersedia tepat waktu sebelum pengguna laporan keuangan kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi yang negative dari para pengguna pasar modal.

Kinerja auditor dalam melakukan proses audit memiliki peran besar dalam ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan kepada publik. Penyelesaian proses audit yang tepat waktu dapat menentukan kualitas audit seorang auditor. Karena auditor yang berkualitas akan menyelesaikan proses auditnya dengan tepat waktu, hal tersebut mencerminkan kecakapan auditor dalam melakukan proses audit.

Pada umumnya, laporan audit yang dipublikasikan mencerminkan kinerja perusahaan yang diaudit, semakin cepat diterbitkan maka semakin relevan informasi tersebut bagi pemakai laporan keuangan. Dengan adanya laporan audit, maka pihak eksternal dapat menilai pertanggungjawaban atas laporan keuangan perusahaan tersebut.

Sedangkan sesuai yang disampaikan oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/2016 pasal 7 ayat 1 yang berisi: “Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir” sehingga perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (*go public*) wajib untuk mempublikasikan laporan tahunan setelah berakhirnya tahun buku periode tertentu. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan tahunan kepada OJK adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku atau 120 hari setelah penutupan buku.

2.2.7 Good Corporate Governance

Corporate Governance atau yang dikenal dengan tata kelola sebuah perusahaan muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola perusahaan yang dapat menimbulkan *agency problem*. *Agency problem* adalah

konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan, sehingga memerlukan sistem pemantauan serta pengawas yang dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan (*corporate governance*) (Nurhidiyanti, 2013).

Menurut Crisdianto (2013) *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur bagaimana suatu organisasi korporasi dikendalikan, diarahkan dan diminta pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Sedangkan menurut Rimardhani (2016) dan Annisa dan Kurniasih (2012) *good corporate governance* merupakan proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders dan mengurangi konflik agensi agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah proses atau struktur yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan yang bertujuan untuk memajukan bisnisnya serta menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Corporate governance muncul untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap investor bahwa dana yang mereka investasikan dalam perusahaan digunakan secara tepat dan efisiensi serta tujuan perusahaan dapat tercapai yaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham dan nilai perusahaan juga meningkat. Perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam *corporate governance* telah di aplikasikan dalam perusahaan dengan baik dan efektif sehingga perusahaan dapat berkembang dan semakin besar (Reza 2012). *Good Corporate Governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan *Good Corporate Governace* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Dalam penerapannya untuk melaksanaka *good corporate governance* dalam suatu perusahaan dibutuhkan prinsip-prinsip sehingga *good corporate governance* bisa terlaksanakan dengan baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang ada diharapkan perusahaan bisa berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kinerjanya menjadi optimal. Secara umum, menurut Pasaribu (2015) prinsip-prinsip dasar penerapan *good corporate governance* terdiri dari empat prinsip yaitu *fairness* (keadilan), *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), dan *responsibility* (pertanggungjawaban).

Dalam prinsip *fairness* (keadilan) menjamin adanya perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama.

Sedangkan untuk prinsip *transparency* (transparan) mewajibksn adanya suatu informasi yang terbuka, akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan dan para pemegang saham kepentingan (*stakeholder*).

Berbeda dengan *transparency* (transparansi), dalam prinsip *accountability* (akuntabilitas) lebih menjelaskan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini mengaskan pertanggungjawaban manajemen terhadap perusahaan dan para pemegang saham.

Dan untuk prinsip terakhir yaitu prinsip *responsibility* (pertanggungjawaban), lebih untuk memastikan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundaga yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau stakeholder dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis serta tetap menjaga lingkunga bisnis yang sehat.

Dari beberapa prinsip diatas, prinsip yang dianggap penting dalam suatu perusahaan adalah prinsip *transparency* (transparan). Dengan adanya transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola. Transparansi dalam suatu perusahaan merupakan suatu prinsip yang dapat menilai kualitas audit karena informasi yang digunakan dalam pengungkapan suatu perusahaan haruslah terbuka dan akurat.

Tujuan dan Manfaat Penerapan Corporate Governace

Corporate governance sebagai suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dikelola dan diawasi, pelaksanaan corporate governace yang baik diakui dapat membantu mempertahankan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Penerapan *Good Coporate Governace* banyak memberikan manfaat baik perusahaan maupun pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan perusahaan. Manfaat penerapan *Corporate Governace* bagi perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan *Corporate Governace* dapat mendorong manajemen mengelolah perusahaan lebih efisien dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk kepentingan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengawasan internal yang lebih efektif dan efisien (Irawan & Farahmita 2012). Sedangkan menurut Forum *for Corporate Governace in Indonesia* dalam menerapkan tata kelola perusahaan ke perusahaan, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Manfaat tersebut yaitu :

1. Mudah untuk meningkatkan modal;
2. Menurunkan biaya modal;
3. Kinerja bisnis peningkatan dan perbaikan kinerja ekonomi;
4. Dampak baik pada harga saham;

Selain itu, menurut Reza (2012) salah satu tujuan dari diterapkannya *corporate governance* adalah laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan oleh manajemen disajikan dengan prinsip akuntabilita dan transparansi. Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi pengguna informasi dari laporan keuangan tersebut karena mempengaruhi keputusan pengguna tersebut. Untuk

mencapai tujuan diterapkannya corporate governance, maka dibentuklah suatu sistem dan susunan tugas wewenang dewan komisaris dan komite audit agar corporate governance tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Proksi dari Good Corporate Governance

Good corporate governance dalam penelitian ini diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

Kepemilikan Institusional

Susanti & Mildawati (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengawasi manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic manager* (Nugroho & Yulianto 2015). Institusional shareholder, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif memantau pengambilan keputusan perusahaan.

Menurut Susanti & Mildawati (2014) dan Simarmata (2014) kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional disebut oleh (A et al. 2015 : 28) sebagai struktur kepemilikan saham suatu perusahaan dimana saham mayoritas dimiliki oleh institusi atau suatu lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lainnya) (Fallis 2103) (Susanti & Mildawati 2014). Kepemilikan Institusional diukur dengan persentase

jumlah saham yang dimiliki oleh pihak instusi dari seluruh jumlah saham yang beredar.

Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik, dewan komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Di Indonesia, dalam struktur kepengurusan perusahaan selalu ada posisi Direksi dan Komisaris. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sedangkan pasal 108 ayat (1) mengatakan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi (Wardhani 2013)

Syarat keanggotaan dewan komisaris berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 adalah:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam Hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris independen.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh Komisaris Independen adalah sebagai berikut :

- a) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
- b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- c) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- d) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten Perusahaan Publik tersebut.

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten, atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan wajib pula mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. (SEOJK, 2015)

Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organisasi Dewan Komisaris maupun dewan anggota Dewan Komisaris

secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakter tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pengawasan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. (SEOJK,2015)

Dalam pedoman umum GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) disebutkan bahwa Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang Terafiliasi. Yang dimaksud dengan "Terafiliasi" adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Disebutkan juga bahwa jumlah Komisaris independen harus dapat menjamin bahwa mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Adanya keberadaan Komisaris Independen ini, karena tidak terafiliasi dengan pendiri atau pemegang saham mayoritas, diharapkan bisa mewakili kepentingan pemegang saham publik. Dengan begitu, kepentingan investor saham sebagai pemegang saham publik lebih terjamin.

Komite Audit

Pada umumnya, menurut Annisa & Kurniasih (2012) komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketahui oleh komisaris independen. Komite audit akan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan pengelolaan usaha yang sehat melalui peran pengawasan yang dilakukan. Komite audit merupakan penunjang dewan komisaris perusahaan dalam menjalankan tugas yang dimiliki sebagai pihak yang melindungi pihak luar perusahaan dari kecenderungan

manajemen perusahaan. Komite audit merupakan penghubung antara manajemen ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan manajemen perusahaan untuk mengembangka usaha.

Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal (Reza 2012). Komite audit dalam suatu perusahaan bertugas dalam membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Menurut Reza (2012) fungsi komite audit terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisarius.

Adanya fungsi dari komite audit tersebut membuat ada dorongan untuk berusaha memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang terdiri dari *fairness, responsibility, accountability dan transparency*.

Reza (2012) memaparkan struktur komite audit terdiri dari:

1. Anggota komite audit diangkat dan dibentuk oleh dewan komisaris.
2. Komite audit sekurang-kurangnya tiga orang.
3. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris perusahaan bertindak sebagai ketua komite audit.

Annisa & Kurnuasih (2012) memaparkan komite audit memiliki manfaat laporan keuangan, yaitu:

1. Berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat.
2. Berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat.
3. Berkurangnya tindakan kecenderungan manajemen dan tindakan ilegal.

Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham. Menurut Chrisdianto (2013) dan Merawati (2014) peran penting komite audit untuk menciptakan *good corporate governance*, membuat adanya tuntutan untuk mempertahankan independensi komite audit dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit harus independen yaitu tidak dapat terpengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan peran pengawasan.

Hal ini dibutuhkan temuan dalam tindak pengawasan yang dilakukan oleh komite audit mampu bersifat obyektif dalam arti sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga terus mendapatkan upaya perbaikan bagi manajemen perusahaan agar selalu mampu menjalankan operasi usaha sesuai dengan tata nilai yang seharusnya berlaku. Komite audit yang independen akan berlaku adil kepada setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan karena tidak membawa kepentingan dari pihak manapun tetapi berlaku adil kepada seluruh pihak berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. Peran penting komite audit dalam *good corporate governance* tersebut mendatangkan tuntutan untuk memasukkan komite audit sebagai bagian dari pengembangan usaha (Chrissianto 2013).

2.2.8 Leverage

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan membutuhkan modal, modal bersumber dari pihak internal yaitu para pemilik perusahaan dan dari pihak eksternal yaitu melalui utang. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur total

utang. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur total utang dengan total asset. *Leverage* memberikan gambaran bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan dengan dibiayai oleh utang dari pihak luar. *Rasio Leverage* merupakan salah satu rasio solvabilitas yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan itu dilikuidasi.

Rasio solvabilitas (*leverage*) yang lain adalah dalam bentuk *Debt To Equity Ratio* (DER), yaitu suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (total debt) dengan nilai seluruh ekuitas (Total Equity). Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman (Alhayati, 2011 dalam Ikhsan, 2015) perusahaan yang sedang tumbuh cenderung mempunyai tingkat utang yang besar karena perusahaan menginginkan perkembangan usahanya tanpa harus dibebani oleh kewajiban membayar deviden kepada pemegang saham yang secara tidak langsung akan mengurangi pendapatan yang seharusnya diperuntukan bagi perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung melaporkan usahanya dengan sangat hati-hati karena kreditur mengawasi jalannya perusahaan agar pengembalian dana yang diberikannya dapat berjalan dengan lancar.

2.2.9 Kompleksitas Operasi

Tingkat kompleksitas operasi perusahaan mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya. Hal ini terjadi karena tingkat kompleksitas operasi suatu perusahaan yang bergantung pada jumlah dan lokasi unit operasinya. Tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan memiliki hubungan sehingga akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian keuangan ke publik.

Jumlah anak perusahaan suatu perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien KAP untuk di audit (Widosari dan Rahardja, 2012). Menurut (Widosari dan Rahardja, 2012), apabila perusahaan memiliki anak perusahaan didalam negeri maka transaksi yang dimiliki klien semakin rumit karena ada laporan konsolidasi yang perlu di audit oleh auditor. Selain itu apabila perusahaan

memiliki anak perusahaan diluar negeri maka laporan tambahan yang perlu di audit adalah laporan reasurement. Perusahaan yang memiliki unit operasi (cabang) lebih banyak akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi auditor untuk melakukan pekerjaan auditnya.

Kompleksitas organisasi atau operasi merupakan akibat langsung dari pembagian pekerjaan dan pembentukan departemen yang berfokus pada jumlah unit yang berbeda secara nyata. Organisasi dengan berbagai jenis atau jumlah pekerjaan dan unit menimbulkan masalah manjerial dan organisasi yang lebih rumit karena terjadi ketergantungan yang semakin kompleks (Martius, 2012). Tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan yang bergantung pada jumlah dan lokasi unit operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produk dan pasarnya, lebih cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti secara lebih dalam. Penjelasan meliputi definisi, indicator variabel, dan pengukuran variabel. Variabel-variabel tersebut dibedakan menjadi, antara lain sebagai berikut :

2.3.1 Hubungan antara Kepemilikan Institusioanl dengan *Audit Delay*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo,2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang

lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic. Kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi tersebut.

Hasil penelitian Savitri Roswita (2010), menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harnida (2005) bahwa ada hubungan antara kepemilikan institusional dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Cornet, et al., (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri. Kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi tersebut.

2.3.2 Hubungan antara Dewan Komisaris Independen dengan Audit Delay

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak memiliki hubungan bisnis, keluarga dengan emiten dan pihak manajemen perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris independen berperan sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen.

POJK Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 20 menyebutkan bahwa Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan

Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Melalui praktik corporate governance yang diukur dengan proporsi komisaris independen diasumsikan mampu mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan auditan perusahaan. Oleh sebab itu, semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan, maka akan dapat mengurangi *audit delay*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktivrina dan Nelyumna (2016) yang menyatakan bahwa dengan adanya kehadiran dewan komisaris dalam persiapan laporan keuangan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik.

2.3.3 Hubungan antara Komite Audit dengan *Audit Delay*

Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan peraturan OJK, setiap perusahaan *go public* diwajibkan membentuk komite audit yang beranggotakan minimal 3 orang. Semakin banyak jumlah komite audit maka *audit delay* akan semakin singkat.

Hasil penelitian Hakam (2014) menjelaskan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay* perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan karena peranan komite audit hanya sebatas memilih akuntan publik dan membantu auditor independen menyelesaikan audit dalam memastikan pelaksanaan audit sesuai standar audit yang berlaku dan tindak lanjut manajemen tentang temuan audit yang dilakukan manajemen. Komite audit tidak ikut secara langsung dalam melakukan audit. Sehingga komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan audit.

2.3.4 Hubungan antara Leverage dengan *Audit Delay*

Perusahaan dengan tingkat Leverage yang tinggi merupakan *bad news* bagi perusahaan sehingga pihak manajemen perusahaan akan cenderung untuk menunda penyampaian laporan keuangan yang memuat berita buruk, untuk menekan *leverage* serendah-rendahnya sebelum dilaporkan. Dilain sisi tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan besarnya kewajiban perusahaan atas hutag-hutagnya, perusahaan dengan kewajiban yang besar cenderung akan meminta auditor untuk menyelesaikan laporan auditan lebih cepat.

Hal ini dikarenakan, perusahaan diawasi oleh pihak kreditor sehingga tekanan kepada perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan lebih cepat akan lebih besar. *Total debt to total assets ratio* mengindikasikan kesehatan dari perusahaan. Proposi *total debt to total assets ratio* yang tinggi akan meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Kedua, mengaudit utang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengaudit modal. Biasanya mengaudit utang lebih melibatkan banyak staf dan lebih rumit dibandingkan mengaudit modal. Dalam hal ini perusahaan akan mengurangi resiko dengan mengundurkan publikasi laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam laporan auditnya. Ini memberikan tanda ke pasar bahwa perusahaan dalam tingkat resiko yang tinggi

Dalam hasil penelitian Kartika (2011), solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Lianto dan Kusuma (2010), solvabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*. Dan yang terakhir menurut Arya dan Budiarta (2014), menyatakan solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Jadi semakin rendah tingkat solvabilitas maka audit delay semakin singkat.

2.3.5 Hubungan antara Kompleksitas Operasi dengan *Audit Delay*

Kompleksitas organisasi atau operasi merupakan akibat langsung dari pembagian kerja dan pembentukan departemen yang berfokus pada jumlah unit yang berbeda secara nyata. Organisasi dengan berbagai jenis atau jumlah pekerjaan dan audit menimbulkan masalah manajerial dan organisasi yang lebih

rumit karena terjadi ketergantungan yang semakin kompleks. Kompleksitas operasi perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang dapat menambah suatu tantangan pada audit.

Menurut Che-Ahmad dan Abidin (2012), kompleksitas operasi perusahaan yang dilihat dari diverifikasi bisnis operasi klien dan jumlah anak perusahaan klien berdampak pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tingkat kompleksitas operasi merupakan sebuah perusahaan bergantung pada jumlah lokasi unit operasinya (Sulistyo, 2010). Ini juga didukung oleh teori agensi semakin besar ukuran operasi perusahaan maka semakin banyak dalam mengungkapkan informasi dan meningkatkan biaya agensi maka akan membuat lamanya proses audit. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan lebih banyak akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi auditor untuk melakukan pekerjaan auditnya (Dewi, 2012). Dalam penelitian Angruningrum, Wirakusuma (2013) Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

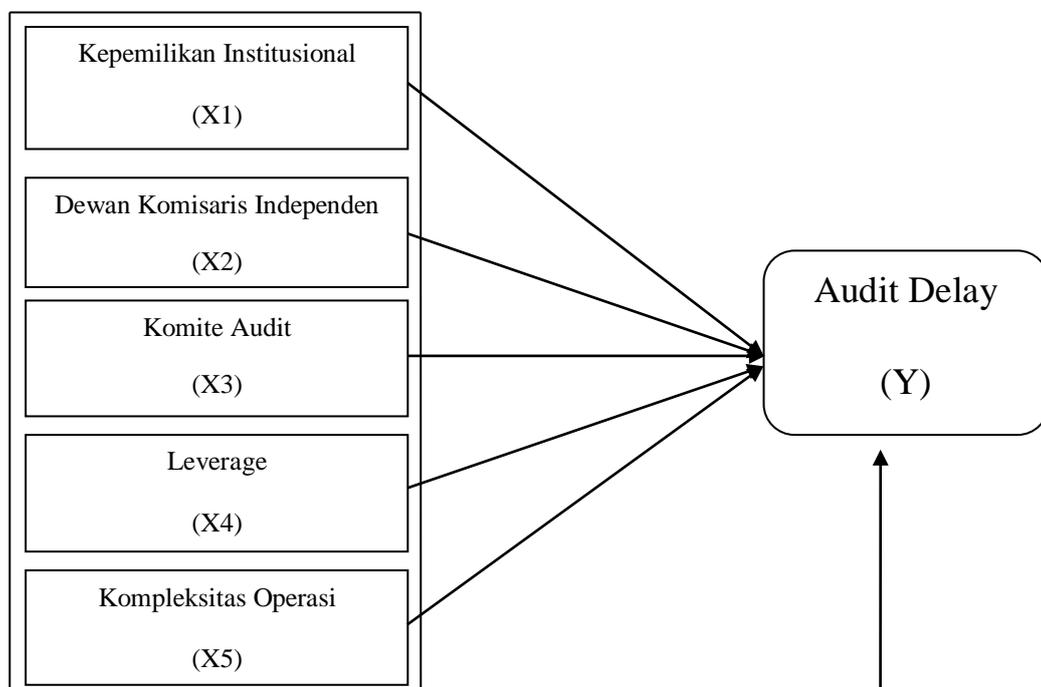
- H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Audit Delay.
- H₂ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Audit Delay.
- H₃ : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Audit Delay.
- H₄ : Leverage berpengaruh positif terhadap Audit Delay.
- H₅ : Kompleksitas Operasi berpengaruh negatif terhadap Audit Delay.
- H₆ : Kepemilikan institusional, Dewan komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Kompleksitas Operasi berpengaruh terhadap Audit Delay.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur pemikiran dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Berdasarkan dari rumusan masalah, latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat diteliti apakah *Good Corporate Governance*, *Leverage* dan Kompleksitas Operasi terhadap *Audit Delay*. Menyederhanakan pemikiran tersebut maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Keterangan :

- X1 : Kepemilikan Institusional
- X2 : Dewan Komisaris Independen
- X3 : Komite Audit
- X4 : Leverage
- X5 : Kompleksitas Operasi
- Y : Audit Delay